RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2020

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan A.I.S Nasution Nomor 2 Palangka Raya

Telp. (0536) 3221723 Fax. (0536) 3224903

E-mail : subprogram.bpsdm@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala anugerah dan rahmat-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Dokumen ini disusun dengan maksud memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja PD ini ada banyak hal yang didapat. Hal ini tentunya dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga dokumen Rancangan Awal Renja PD tahun 2020 ini dapat diterima dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 21 Februari 2019

KEPALA BADAN,

SRI WIDANARNI, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690212 198911 2 001

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 LANDASAN HUKUM	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017	3
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	5
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	5
	2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	8
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	10
	3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	14
	3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	15
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	17
BAB V	PENUTUP	20

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tupoksi yang selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yaitu “Kalteng maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”, yaitu pada misi ke-6 (enam) tentang Tata Kelola Pemerintahan.

Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia sumber daya aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dengan demikian SKPD Provinsi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada RPJMD yang telah memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk satu tahun dengan pedoman Renstra yang sudah di susun, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Dalam hal ini penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2017 sebagaimana susunan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada Paragraf 2, Pasal 139, Rancangan Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Awal Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan maksud :

- Memberikan gambaran dalam bentuk dokumen tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019, mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2019 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan.

2.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, berisikan Usulan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai kajian mendalam dikaitkan dengan renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat tentang kebijakan umum yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Awal Renja PD Tahun 2020, memuat rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RKA.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun rencana tindak lanjut.

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2018 pada pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga sesuai dengan Review Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Capaian tersebut berdampak positif terhadap perkiraan capaian program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2019.

Dalam tahun anggaran 2018, anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.45.792.632.857,- dari keseluruhan anggaran tahun 2018 tersebut telah terserap sebesar Rp.41.186.589.195,- atau terserap sebesar 89,94%, dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.36.952.579.650,- terealisasi sebesar Rp.33.661.211.837,- atau terserap sebesar 91,09%, dan belanja tidak langsung sebesar Rp.8.840.053.207,- terealisasi sebesar Rp.7.525.377.358,- atau terserap sebesar 85,13%. Secara garis besar realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Langsung	36.952.579.650,-	33.661.211.837,-	91,09%
2.	Belanja Tidak Langsung	8.840.053.207,-	7.525.377.358,-	85,13%
JUMLAH		45.792.632.857,-	41.186.589.195,-	89,94%

Adapun rincian penyerapan anggaran dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PAGU DANA	REAL KEUANGAN	
		(Rp)	Rp.	%
1	2	3	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,820,045,661	5,647,234,775	97.03%
	Penyediaan jasa surat menyurat	25,000,000	16,415,700	65.66%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	881,943,150	850,093,325	96.39%
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15,000,000	14,417,250	96.12%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,000,000	3,945,400	49.32%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,762,562,500	1,736,897,800	98.54%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,000,000	85,185,300	94.65%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50,000,000	49,714,000	99.43%
	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	49,911,250	99.82%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66,000,000	54,035,600	81.87%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	606,075,000	594,588,000	98.10%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	832,974,000	823,850,000	98.90%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	713,035,000	702,237,000	98.49%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35,000,000	35,000,000	100.00%
	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000	38,448,500	85.44%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	355,456,011	354,820,400	99.82%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150,000,000	149,911,400	99.94%
	Rujukan berobat PNS	50,000,000	27,116,000	54.23%
	Pengembangan Buletin Kediklatan	84,000,000	60,647,850	72.20%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,139,097,239	10,731,445,512	96.34%
	Pembangunan gedung kantor	9,792,596,403	9,453,143,450	96.53%
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	426,000,000	419,881,262	98.56%
	Pengadaan mebeleur	426,290,000	422,966,000	99.22%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	287,500,836	285,124,400	99.17%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146,560,000	106,377,400	72.58%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60,150,000	43,953,000	73.07%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	50,022,000	49,715,000	99.39%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50,022,000	49,715,000	99.39%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	511,193,000	479,466,175	93.79%
	Penilaian angka kredit	121,193,000	105,302,600	86.89%
	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	200,000,000	185,864,925	92.93%
	Penjamin Mutu Diklat PMD	100,000,000	99,400,000	99.40%
	Re Akreditasi Diklat	90,000,000	88,898,650	98.78%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209,688,000	201,944,150	96.31%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	14,349,000	13,678,500	95.33%
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16,339,000	11,119,450	68.05%
	Penyusunan RKA-SKPD	60,000,000	59,978,900	99.96%
	Penyusunan LAKIP	9,000,000	7,998,300	88.87%
	Penyusunan renja SKPD	25,000,000	25,000,000	100.00%
	Penyusunan Laporan TEPR/SIMPPD	30,000,000	29,973,000	99.91%
	Laporan LKPI dan LPPD	20,000,000	19,400,000	97.00%
	Inventarisasi Barang Milik daerah	35,000,000	34,796,000	99.42%
6	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6,836,701,000	6,125,591,325	89.60%
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	4,446,701,000	4,094,796,400	92.09%
	Diklat Administrasi Kearsipan	210,000,000	168,400,850	80.19%
	Diklat Tata Naskah Dinas	210,000,000	181,365,525	86.36%
	Diklat Pengelolaan Aset	210,000,000	196,770,975	93.70%
	Diklat Training Officer Course (TOC)	240,000,000	177,048,625	73.77%

NO.	URAIAN	PAGU DANA	REAL KEUANGAN	
		(Rp)	Rp.	%
1	2	3	5	6
	Diklat Keuangan Daerah	210,000,000	185,687,400	88.42%
	Diklat Satpol PP	-	-	0.00%
	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	200,000,000	171,569,700	85.78%
	Diklat Dasar Manajemen Bencana	210,000,000	206,442,700	98.31%
	Diklat Revolusi Mental	200,000,000	197,486,150	98.74%
	Diklat Bela Negara	210,000,000	175,869,200	83.75%
	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	210,000,000	199,377,600	94.94%
	Diklat Auditor	140,000,000	88,554,950	63.25%
	Bimtek Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi	140,000,000	82,221,250	58.73%
7	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	733,753,000	689,399,050	93.96%
	Evaluasi Alumni pasca diklat	148,753,000	134,368,750	90.33%
	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	585,000,000	555,030,300	94.88%
8	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	162,900,000	158,141,375	97.08%
	Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov Kalteng	162,900,000	158,141,375	97.08%
9	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	307,003,850	277,943,675	90.53%
	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	107,000,000	105,713,700	98.80%
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu)	50,003,850	43,472,100	86.94%
	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan	150,000,000	128,757,875	85.84%
10	Program Pendidikan Kedinasan	9,308,194,376	7,711,676,175	82.85%
	Pendidikan penjenjangan structural	8,907,350,000	7,345,575,100	82.47%
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	144,922,188	134,785,075	93.01%
	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	255,922,188	231,316,000	90.39%
11	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur	550,000,000	369,572,200	67.19%
	Uji Kompetensi dan Sertifikasi	300,000,000	133,209,600	44.40%
	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	250,000,000	236,362,600	94.55%
	JUMLAH	35,321,594,276	32,164,185,737	91.09%

Dari anggaran Belanja Langsung yang tersedia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar Rp.35.321.594.276,- yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp.32.164.185.737,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 91,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terdapat deviasi anggaran sebesar 8,91%. Deviasi anggaran yang terjadi disebabkan beberapa faktor:

1. Tidak tepenuhinya jumlah kuota peserta diklat dari Kabupaten/Kota disebabkan karena terjadi rasionalisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana anggaran untuk pengiriman peserta diklat dari Kabupaten/Kota dikurangi dari jumlah target awal yang sudah ditetapkan dalam APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Terdapat *Silpa* hasil lelang dan pelaksanaan kegiatan rutin kediklatan sebagai bentuk efisiensi anggaran di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Terjadinya rasionalisasi anggaran pada anggaran kegiatan diklat Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut berimplikasi terhadap pengurangan jumlah kuota peserta

diklat yang dikirimkan dan menyebabkan penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun secara keseluruhan target PAD BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Adapun perincian capaian PAD di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	SOPD	Target Total (Rp)	Total	
			Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	850,000,000.00	1,160,860,000.00	136,57

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun capaian kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan			75%	80%	80%	85%	95%	0%	96%						
2	Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan			75%	80%	80%	85%	95%	56%	88%						
3	Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus post test			60%	65%	65%	70%	85%	126%	99%						
4	Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus post test			60%	65%	65%	70%	80%	31%	99%						
5	Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat			75%	80%	80%	85%	95%	0%	55%						
6	Persentase layanan terhadap kepuasan penyelenggaraan diklat			70%	75%	75%	80%	90%	75%	72%						

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan telah melalui berbagai proses yang dilaksanakan bersama antar bidang dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah melalui berbagai kajian mendalam dikaitkan dengan renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan ketika telah dijadikan dokumen PPAS dan DPA pada saatnya nanti bias dijadikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	2500 buah	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Lama penggunaan telepon, air, listrik, internet dan website	1 tahun	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Provinsi	Jumlah gedung yang diasuransikan	2 gedung	
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah kendaraan bermotor dinas/operasional selama setahun	5 unit	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi	Pengelolaan administrasi keuangan	1 tahun	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara	4 gedung	
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Provinsi	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	60 unit	
8	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi	Penggunaan alat tulis kantor	1 tahun	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	982 pak, 200 eksemplar dan 101.105 lembar	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara dan pengadaan generator listrik	2 gedung dan 1 unit	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	6 paket	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah koran dan majalah kantor	25 eksemplar	

14	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi	Jumlah rapat dan sosialisasi	35 kali	
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	80 orang/kali	
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi	Jumlah PNS dan Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	80 orang/kali	
17	Pengembangan Buletin Kediklatan	Provinsi	Jumlah buletin yang diterbitkan	2 buletin	
18	Rapat Koordinasi Pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah	Provinsi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi BKD/BKPSDM se-Kalimantan Tengah	4 kali	
II Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pembangunan Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah pembangunan dilingkungan kantor dan asrama	1 paket	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor dinas/ operasional	5 unit	
3	Pengadaan Mebeleur	Provinsi	Jumlah pengadaan meubelair kelas dan asrama	2 paket	
4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Jumlah pemeliharaan kendaraan bermotor dinas/ operasional selama setahun	10 unit	
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang diperbaiki	4 unit	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Jumlah perlengkapan kantor dan asrama yang diperbaiki	100 unit	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi	Jumlah fasilitas kantor (AC dan generator listrik) yang terpelihara	140 unit	
8	Rehabilitasi/perbaikan gedung kantor	Provinsi	Jumlah gedung yang diperbaiki	2 gedung	
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Provinsi	Jumlah pakaian yang dibuat	102 stel	
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Penilaian angka kredit	Provinsi	Jumlah penilaian angka kredit dalam setahun	2 kali	
2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Provinsi	Jumlah pedoman kompetensi yang dibuat	3 pedoman	
3	Penjamin mutu diklat PMD	Provinsi	Pelaksanaan diklat yang berkualitas	1 tahun	
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Provinsi	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	
3	Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah laporan RKA	2 laporan	
4	Penyusunan LAKIP	Provinsi	Jumlah laporan LAKIP	1 laporan	
5	Penyusunan Renja SKPD	Provinsi	Jumlah laporan renja	2 laporan	

6	Laporan LKPJ dan LPPD	Provinsi	Jumlah laporan penyerapan anggaran	4 laporan	
7	Inventarisasi	Provinsi	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	1 laporan	
8	Penyusunan Laporan TEPPRA/SIMPDP	Provinsi	Jumlah laporan inventarisasi BMD	1 laporan	
9	Monitoring dan evaluasi pelaporan	Provinsi	Jumlah laporan MONEV dalam setahun	4 laporan	
VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
1	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)	Provinsi	Jumlah sertifikat yang didaftarkan	2000 nomor	
VII Program Pendidikan Kedinasan					
1	Pendidikan penjenjangan struktural	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	480 Orang	
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Provinsi	Jumlah Diklat yang evaluasi	1 Tahun	
3	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	62 orang	
VIII Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan					
1	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	Provinsi	Jumlah laporan kediklatan	4 laporan	
2	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Provinsi	Layanan informasi publik atas penyelenggaraan diklat	1 Tahun	
3	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi	Jumlah buku yang tersusun selama 1 tahun	500 buku	
4	Pengembangan dan pemanfaatan informasi kediklatan berbasis website	Provinsi	Jumlah informasi pelaksanaan kediklatan	38 informasi	
IX Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	1600 orang	
2	Diklat penata laporan keuangan dan aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	80 orang	
3	Diklat Administrasi Kearsipan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	80 orang	
4	Diklat Tata Naskah Dinas	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
5	Diklat Pengelolaan Aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
6	Diklat Keuangan Daerah	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
7	Diklat satpol PP	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
8	Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
9	Diklat Dasar Manajemen Bencana	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
10	Diklat Revolusi Mental	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
11	Diklat Bela Negara	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
12	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
13	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
14	Diklat Auditor	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
15	Diklat Penyusunan RENSTRA	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	

			mengikuti diklat		
16	Diklat Penyusunan RPJMD	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
17	Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
18	Diklat Pengelolaan Barang dan Aset	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
19	Diklat Penyuluh Pertanian	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang	
20	Diklat Pengawas Perikanan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang	
21	Diklat Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 Orang	
22	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	60 orang	
23	Workshop Mentor	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
24	Workshop Coach	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
25	Workshop Penguji	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
26	Workshop Penyusunan RENJA	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti workshop	40 Orang	
27	Workshop Inovasi	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
28	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa atau Kelurahan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	40 Orang	
29	Diklat Management of Trainer (MoT)	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
30	Diklat Training of Trainer (ToT)	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
31	Diklat Pranata Komputer	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	25 orang	
32	Diklat Analisis Jabatan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
33	Diklat Kepustakaan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
34	Diklat Kearsipan	Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40 orang	
35	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan	Provinsi	Jumlah anggota Dewan yang mengikuti orintasi dan pendalaman tugas	160 orang	
X	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				
1	Evaluasi Alumni Pasca Diklat	Provinsi	Jumlah alumni diklat yang didata	75 orang/daerah	
2	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	Provinsi	Jumlah booth peserta pameran inovasi pelayanan publik	50 booth	
XI	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur				
1	Uji kompetensi dan sertifikasi	Provinsi	Jumlah sertifikat PNS dan Non-PNS yang melakukan uji kompetensi selama setahun	120 buah	
2	Penyusunan perangkat pembelajaran	Provinsi	Jumlah pedoman penyelenggaraan diklat	30 buku	
3	Pengelolaan Sertifikasi Diklat Aparatur Manajerial dan Teknis	Provinsi	Jumlah sertifikasi diklat yang diterbitkan	2000 lembar	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi di Indonesia adalah pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Vital Birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Amanah tugas yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan secara profesional dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap pengabdian yang kokoh terhadap bangsa dan Negara serta kecintaannya pada eksistensi persatuan dan kesatuan.

Aparatur pemerintah menempati posisi yang amat strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan pada berbagai fungsi yang terinternalisasi di dalamnya, yakni fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja aparatur akan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan, sehingga berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kinerja dimaksud harus menjadi agenda kebijakan utama, terlebih lagi bagi Pemerintah Daerah.

Kinerja aparatur pemerintah sangat terkait dengan aspek-aspek kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja serta kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan yang tepat mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dimana dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan standarisasi kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur serta melaksanakan sistem komputerisasi administrasi kediklatan.

Program yang dilaksanakan meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Kedinasan, Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Pengembangan Aparatur yang merupakan acuan bagi sub bidang/bagian dalam menjalankan tupoksinya.

Sebagaimana diketahui, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu program/kegiatan pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Telaahan terhadap kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, Telaahan terhadap kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu program /kegiatan akhir pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan telaahan dan analisis lebih lanjut yang dapat dilihat dari nilai capaian kelompok indikator kinerja.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing global melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara berbasis kompetensi di Kalimantan Tengah	1. Meningkatnya Aparatur Peserta Diklat yang Profesional dan Kompeten	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	75%	80%	80%	85%	95%
			Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	75%	80%	80%	85%	95%
			Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus post test	60%	65%	65%	70%	85%
			Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus post test	60%	65%	65%	70%	80%
			Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat	75%	80%	80%	85%	95%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Diklat	Persentase layanan terhadap kepuasan penyelenggaraan diklat	70%	75%	75%	80%	90%

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program dan kegiatan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan program dan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah
- 4 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 8 Penyediaan alat tulis kantor
- 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 14 Penyediaan makanan dan minuman
- 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 17 Pengembangan Buletin Kediklatan
- 18 Rapat Koordinasi Pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah

II Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 3 Pengadaan Mebeleur
- 4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
- 8 Rehabilitasi/perbaikan gedung kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1 Penilaian angka kredit
- 2 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- 3 Penjamin mutu diklat PMD

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3 Penyusunan RKA-SKPD
- 4 Penyusunan LAKIP
- 5 Penyusunan Renja SKPD
- 6 Laporan LKPJ dan LPPD
- 7 Inventarisasi
- 8 Penyusunan Laporan TEPRA/SIMPPD
- 9 Monitoring dan evaluasi pelaporan

VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1 Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)

VII Program Pendidikan Kedinasan

- 1 Pendidikan penjurangan struktural
- 2 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
- 3 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

VIII Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan

- 1 Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan
- 2 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 3 Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan
- 4 Pengembangan dan pemanfaatan informasi kediklatan berbasis website

IX Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

- 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
- 2 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
- 3 Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)
- 4 Diklat penata laporan keuangan dan aset
- 5 Diklat satpol PP
- 6 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- 7 Diklat Pengelolaan Aset
- 8 Diklat Keuangan Daerah
- 9 Diklat Administrasi Kearsipan
- 10 Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa
- 11 Diklat Dasar Manajemen Bencana
- 12 Diklat Revolusi Mental
- 13 Diklat Bela Negara
- 14 Diklat Tata Naskah Dinas

- 15 Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- 16 Diklat Auditor
- 17 Diklat Penyusunan RENSTRA
- 18 Diklat Penyusunan RPJMD
- 19 Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil
- 20 Diklat Pengelolaan Barang dan Aset
- 21 Diklat Penyuluh Pertanian
- 22 Diklat Pengawas Perikanan
- 23 Diklat Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan
- 24 Workshop Mentor
- 25 Workshop Coach
- 26 Workshop Penguji
- 27 Workshop Penyusunan RENJA
- 28 Workshop Inovasi
- 29 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- 30 Diklat Management of Trainer (MoT)
- 31 Diklat Training of Trainer (ToT)
- 32 Diklat Pranata Komputer
- 33 Diklat Analisis Jabatan
- 34 Diklat Kepustakaan
- 35 Diklat Kearsipan

X Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

- 1 Evaluasi Alumni Pasca Diklat
- 2 Kompetisi Inovasi Pasca Diklat

XI Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur

- 1 Uji kompetensi dan sertifikasi
- 2 Penyusunan perangkat pembelajaran
- 3 Pengelolaan Sertifikasi Aparatur Manajerial

Program dan kegiatan mengalami perubahan memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan program dan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas, hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Rancangan Awal Renja PD Tahun 2020 berikut :

RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Murni	APBD Kontribusi		Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5,684,000,000	-		
4 04 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya administrasi surat menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	25,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, tersedianya internet dan web	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	1,150,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Terlindungnya aset kantor dari keadaan kahar dan kebakaran	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	15,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya tanggungan pajak kendaraan bermotor dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	8,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	1,983,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya lingkungan kantor dan asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	75,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	75,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya jaringan dan instalasi listrik kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	75,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	800,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	250,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	35,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat / sosialisasi	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	60,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi bagi kemajuan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	550,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi bagi kemajuan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 51	Pengembangan Buletin Kediklatan	Terpenuhinya pengembangan informasi kediklatan melalui buletin	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	98,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 97	Rapat koordinasi Pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah	Terselenggaranya koordinasi pengembangan pengembangan ASN se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	125,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				5,960,000,000	-		
4 04 01 01 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana yang layak untuk penyelenggaraan diklat	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	3,000,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	700,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 10	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya fasilitas gedung kelas dan asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	300,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor / kelas / Asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	1,000,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas / operasional	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	160,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 01 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	250,000,000	-	APBD Murni	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Murni	APBD Kontribusi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 04 01 01 195	Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor/kelas/asrama	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	400,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur				75,000,000	-		
4 04 01 03 02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan seragam kedinasan BPSDM	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	75,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				370,000,000	-		
4 04 01 05 58	Penilaian Angka Kredit	Tersedianya layanan penilaian atas angka kredit Widyaiswara se – kalimantan tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	120,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 05 124	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Tersedianya layanan penguji dan penilaian kompetensi PNS dan Non PNS	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	125,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 05 127	Penjamin Mutu Diklat (PMD)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	125,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				309,000,000	-		
4 04 01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	19,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	22,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 06	Penyusunan RKA-SKPD	tersedianya RKA SOPD - BPSDM	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	66,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 14	Penyusunan LAKIP	Tersedianya laporan LAKIP SOPD	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	14,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 15	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya laporan Renja SOPD	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	28,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 35	Laporan LKPJ dan LPPD	Tersedianya Laporan TEPR / SIMP3D	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	20,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 51	Inventarisasi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKPJ	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	35,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 60	Penyusunan Laporan TEPR/SIMP3D	Tersedianya laporan inventarisasi BMD	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	30,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 06 97	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Tersedianya laporan evaluasi terhadap program dan kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	75,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				7,074,200,000	15,323,600,000		
4 04 01 15 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Terlaksananya diklat bagi CPNS dan Honorer K1 / K2	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	-	14,873,600,000	APBD Kontribusi	
4 04 01 15	Diklat penata laporan keuangan dan aset	Terlaksananya Diklat Dasar Manajemen Bencana bagi PNS/ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Administrasi Kearsipan	Terlaksananya Diklat Revolusi Mental bagi PNS/ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Tata Naskah Dinas	Terlaksananya Diklat Tata Naskah Dinas	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Pengelolaan Aset	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Keuangan Daerah	Terlaksananya Diklat Keuangan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat satpol PP	Terlaksananya Diklat satpol PP	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	210,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Dasar Manajemen Bencana	Terlaksananya Diklat Dasar Manajemen Bencana	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Revolusi Mental	Terlaksananya Diklat Revolusi Mental	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Bela Negara	Terlaksananya Diklat Bela Negara	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Auditor	Terlaksananya Diklat Auditor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	400,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya Diklat Penyusunan RENSTRA	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Penyusunan RPJMD	Terlaksananya Diklat Penyusunan RPJMD	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksananya Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Murni	APBD Kontribusi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 04 01 15	Diklat Pengelolaan Barang dan Aset	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Barang dan Aset	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Kontribusi	
4 04 01 15	Diklat Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Diklat Penyuluh Pertanian	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Pengawas Perikanan	Terlaksananya Diklat Pengawas Perikanan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Diklat Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PIMPEMDAGRI)	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	1,694,200,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Workshop Mentor	Terlaksananya Workshop Mentor	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Workshop Coach	Terlaksananya Workshop Coach	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Workshop Penguji	Terlaksananya Workshop Penguji	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Workshop Penyusunan RENJA	Terlaksananya Workshop Penyusunan RENJA	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Workshop Inovasi	Terlaksananya Workshop Inovasi	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa atau Kelurahan	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa atau Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Management of Trainer (MoT)	Terlaksananya Diklat Management of Trainer (MoT)	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Training of Trainer (ToT)	Terlaksananya Diklat Training of Trainer (ToT)	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Bela Negara	Terlaksananya Diklat Bela Negara	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Analisis Jabatan	Terlaksananya Diklat Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Kepustakaan	Terlaksananya Diklat Kepustakaan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Diklat Kearsipan	Terlaksananya Diklat Kearsipan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	180,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 15	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan	Terlaksananya Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	450,000,000	APBD Murni dan APBD Kontribusi	
4 04 01 16	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				631,000,000	-		
4 04 01 16 01	Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat Manajerial	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat Manajerial	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	181,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 16 03	Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	Terlaksananya Kompetisi Inovasi Pasca Diklat	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	450,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 17	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				150,000,000	-		
4 04 01 17 37	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)	Tersedianya Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 18	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan				508,000,000	-		
4 06 9 18 31	Pengumpulan dan pengolahan data kediklatan	Tersedianya data pelaksanaan program / kegiatan kediklatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	83,000,000	-	APBD Murni	
4 06 9 18 32	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Informasi yang dapat diterima publik	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	125,000,000	-	APBD Murni	
4 06 9 18 33	Penataan Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan	Tertibnya data dan bahan perpustakaan	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	-	APBD Murni	
4 06 9 18 34	Pengembangan dan pemanfaatan informasi kediklatan berbasis website	Terpenuhinya informasi kegiatan kediklatan di website	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 19	Program Pendidikan Kedinasan				5,253,840,000	6,776,800,000		
4 04 01 19 02	Pendidikan Penjurusan Struktural	Terlaksananya diklat bagi eselon II, III, dan IV	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	4,568,840,000	6,776,800,000	APBD Murni dan APBD Kontribusi	
4 04 01 19 03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Terpenuhinya data evaluasi penyelenggaraan pendidikan diklat	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	185,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 19 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terpenuhinya pengembangan kompetensi PNS	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	500,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 20	Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur dan Pemda				360,000,000	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Murni	APBD Kontribusi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 04 01 20 01	Uji Kompetensi Aparatur dan Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi PNS/ASN dan Non PNS/ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	160,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 20 02	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	Terpenuhinya pedoman pelaksanaan kegiatan diklat	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	150,000,000	-	APBD Murni	
4 04 01 20 03	Pengelolaan Sertifikasi Aparatur Manajerial dan Teknis		Provinsi Kalimantan Tengah	100%	50,000,000	-	APBD Murni	
TOTAL					26,375,040,000	22,100,400,000		

KEPALA BADAN,

SRI WIDANARNI, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690212 198911 2 001

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

BAB V PENUTUP

Penetapan visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam dokumen Rancangan Awal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020 dengan berdasarkan atas perubahan aturan tentang organisasi. Selain itu juga mempertimbangkan untuk mewujudkan pelayanan kediklatan yang profesional melalui aparaturnya yang memiliki kompetensi, bermoral, akuntabel dan sejahtera sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagai agenda reformasi birokrasi.

Upaya pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah diarahkan pada pengembangan sistem manajemen kediklatan yang ada, membudayakan instrumen/infrastruktur manajemen kediklatan, mengembangkan sistem informasi kediklatan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya secara bertahap.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional bukan hal yang mudah karena menuntut adanya kejelasan komunikasi dan komitmen yang saling mendukung dari lini pelaksana sampai pada pejabat pembuat kebijakan.